



# BPK Daerah Diberi Kewenangan Audit Tindak Korupsi

**JAKARTA (HR)**- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan mendukung percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Di mana, dukungan tersebut ditujukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan dengan pejabat eselon I dan II BPK Pusat dan Perwakilan BPK seluruh Indonesia.

Ketua BPK RI, Rizal Djalil mengatakan, dari hasil rapat koordinasi tersebut BPK akan merekomendasikan Standard Operating Procedure (SOP) mengenai percepatan penanganan Tipikor.

"Terobosan besar yang kita lakukan kalau dahulu semua permintaan itu harus ke kantor pusat, sekarang BPK mendelegasikan kepada kantor setempat, kita menyediakan SOP, itu sudah selesai disosialisasikan pada raker, dan mengumpulkan semua pejabat daerah untuk kita berikan pengertian kebijakan baru yang harus dilaksanakan," kata Rizal di Kantornya, Jakarta, Jumat (26/9).

Rizal menambahkan, pembuatan SOP ini juga merupakan sebagai wujud realisasi komitmen dalam memberantas tindakan pidana korupsi, baik di

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Bahkan kalau ada permintaan penegak hukum tidak ada satu hari di meja saya, bahkan setengah hari sudah saya kasih ke pak Sekjen," tambahnya.

Rizal menuturkan, SOP ini juga sebagai acuan menindak langsung kepada sesuatu hal yang berindikasikan tindakan pidana korupsi. "Saya salah satu tim perumus ini, maka langsung ditindak, agar tidak adanya perlakuan penghilangan bukti," ujar dia.

Oleh karena itu, dirinya pun berharap pelaksanaan SOP ini dapat segera diterapkan oleh seluruh kantor BPK daerah. Sebab, kegiatan penyimpangan yang bermuara pada tindak korupsi sudah sangat kronis di Indonesia. (okz/ara)





HALUAN RIAU/ANTARA

#### **Hasil Rapat Koordinasi BPK-APH**

Ketua BPK Rizal Djalil (tengah) didampingi Sekjen Hendar Ristriawan (kiri) dan Plt Karo Humas dan Kerjasama Internasional Aksanul Khaq (kanan) menunjukkan data hasil temuan tindak pidana korupsi usai jumpa pers hasil rapat koordinasi BPK dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/9). Selama periode 2010-2014 BPK telah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan 'entitas' sebanyak 201.976 senilai Rp.66,17 triliun, penyelamatan keuangan negara senilai Rp.22,45 triliun dan unsur pidana hingga akhir Juni 2014 sebanyak 441 temuan senilai Rp.43,4 triliun.